

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF DI DESA DONOWARIH KECAMATAN KARANGPLOSO
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh:
Robertus Ola Mangu
Nim 2016210150

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

Ringkasan

Indonesia adalah bangsa yang otonom, keindahan Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan setiap orang Indonesia turut andil dalam kemerdekaan negara ini. Dengan Pancasila sebagai dasar negara dan aturan-aturannya, Kemajuan masyarakat pada dasarnya adalah perbaikan seluruh individu dan seluruh masyarakat. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan taraf hidup dengan tetap memelihara keadilan sosial yang merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Teknik eksplorasi dilakukan dengan menggunakan strategi subjektif. Prosedur untuk menentukan sumber adalah pemeriksaan purposive. Dalam penelitian, peneliti menggunakan dokumen, wawancara serta observasi sebagai metode pengumpulan data. Dalam pemeriksaan informasi, pencipta menggunakan penurunan informasi, tampilan informasi, dan gambar akhir/konfirmasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto, sumber tertulis, serta kata-kata dan tindakan sebagai sumber data. Untuk menguji validitas tingkat kepercayaan terhadap informasi, analisis menggunakan triangulasi, yaitu secara spesifik menggambarkan pertemuan, persepsi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Donowarih dalam pembangunan desa dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, gotong royong, dan pemberian bantuan. Pemerintah desa terus memberikan informasi, melibatkan masyarakat secara langsung, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan ide, pendapat, dan gagasan dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif. Dari hasil pemeriksaan pada bagian yang lalu, perbaikan kota di Kota Donowarih sendiri sudah mengenal pergantian kegiatan secara partisipatif atau mengikutsertakan wilayah setempat secara langsung mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga penilaian. Faktor pendukung kerjasama daerah dalam kemajuan kota di Kota Donowarih sendiri disebabkan oleh kewajaran rencana perbaikan dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat kota saat ini.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Desa, Partisipasi Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa merdeka yang memperoleh kemerdekaannya melalui usaha setiap orang Indonesia dan keindahan Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan kebijaksanaannya. sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945.

Karena merupakan komponen penting dalam pembangunan baik daerah maupun nasional, maka pembangunan desa memiliki peran yang sangat penting. Ini harus terlihat melalui berbagai program perbaikan yang direncanakan oleh otoritas publik untuk kemajuan kota. Pembangunan desa termasuk dalam program kerja hampir semua organisasi, khususnya pemerintah daerah. Jelas, mengingat pemahaman bahwa kota adalah unit geografis utama yang merupakan tempat tinggal sebagian besar penduduk.

Desa berada di garis depan dan langsung di tengah masyarakat, meskipun berada di bawah hirarki pemerintahan. Hasilnya, kami yakin bahwa desa akan selalu mendapat manfaat dari setiap prakarsa pembangunan yang disponsori pemerintah. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan desa, seperti keberadaan desa yang terisolir atau terpencil (Pusat Unggulan). Tingkat pendapatan, produktivitas, serta pendidikan penduduk yang semuanya masih relatif rendah masih belum merata, serta masih minimnya infrastruktur sosial ekonomi.

Pada akhirnya, semua itu membuat penduduk semakin miskin. Realitas ini membuat otoritas publik semakin serius melaksanakan proyek dan tugas perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan kota. Namun proyek atau usaha yang dikoordinasikan dalam perbaikan kota tidak dapat berfungsi dengan baik karena sebagian besar dilakukan jauh dari kota (Korten, 1988:247).

Perbaikan kota yang wajar menunjukkan sebuah siklus di mana upaya wilayah lokal kota digabungkan dengan upaya otoritas publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi, kondisi sosial, serta budaya masyarakat. sehingga pemerintah dan masyarakat, yang berperan sama dalam pembangunan desa, sekurang-kurangnya merupakan dua pemangku kepentingan (Korten, 1988:378).

Desa Donowarih di Kecamatan Karangploso menjadi fokus penelitian ini. Pengalaman pemerintah selama ini adalah mengurangi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan rendah akibat adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Sebab, tanpa disadari, tugas otoritas publik itu sendiri masih lebih besar. meski dalam bentuk regulasi yang tidak memberikan fleksibilitas yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu ciri kepribadian Indonesia adalah partisipasi masyarakat, yaitu inisiatif sendiri dan gotong royong. Drive yang berarti kemauan, kemauan melebihi keinginan, sedangkan perbaikan diri kerjasama bersama mengandung pengertian kapasitas, hubungan kekeluargaan, sehingga harus dikoordinasikan. Kerja sama daerah dalam siklus kemajuan mencakup

pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian peningkatan serta pengembangan dan dukungannya.

Karena Desa Donowarih Kecamatan Karangploso merupakan bagian dari Kabupaten Malang, maka perlu melibatkan atau melibatkan anggota masyarakat guna mendukung cita-cita pembangunan desa. Hal ini karena visi dan misi pembangunan desa adalah meningkatkan kerja pembangunan.

Observasi pra penelitian penulis mengungkapkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, khususnya pada berbagai tahapan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, relatif masih kurang. Dalam pembenahan kota di Kota Donowarih sendiri, pemajuan difokuskan pada kepentingan umum, namun demikian pembenahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah setempat menjadi salah satu penyebab rendahnya dukungan daerah dalam pembenahan kota.

Penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang” tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, berdasarkan uraian di atas masalah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan disana?
2. Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, seberapa besar partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Donowarih Karangploso Kecamatan, Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat

1. Sebagai bahan kajian teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik, dan digunakan untuk menambah pemahaman intelektual tentang perencanaan pembangunan partisipatif.
2. Khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan partisipatif sebagai sumber daya pemerintah desa khususnya Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2011. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Anthonius Ibori. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Kabupaten Teluk Bituni, Jurnal Governance, sebagaimana diakses pada 1 November 2022 melalui link akses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1473/1173>.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- C.S.T Kansil. 1983. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Insintpress: Yogyakarta
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, d. M. 2013. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih. Kawistara, 3, 131.
- Dwi Rahayu Martina. 2018. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Lampung.
- Grahita Chandrarin. 2017. Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif. Jakarta: Salemba Empat.
- Henryk Stepanus. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 612 – 625. ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Herman. 2019. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. STIE Muhammadiyah Mamuju.
- Kessa, Wahyudin. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Khairuddin. 1992. "Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan", Liberty, Yogyakarta
- Korten, David C. Dan Sjahrir, Ed. 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta
- Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

- Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yudhiansyah Eka Saputra. 2016. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kasus: Dana Desa di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau). Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Zamroni. 2011. Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.